



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 473/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan tata laksana serta membangun aparatur negara agar mampu mengembangkan misi, tugas dan fungsi serta perannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;

b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. jumlah kebutuhan;
 - b. peta jabatan; dan
 - c. uraian jabatan.
- KETIGA : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam *google drive* dengan link:
<https://bit.ly/LampiranUraianJabatanBadanKesbangpol>.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 371/KEP/HK/2022 Tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat /Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP 196609181986021001

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 473 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 2 DESEMBER 2025

TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1863	1	0	0	-1	1 Orang		1.49	A (Sangat Baik)
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	6839	5	0	0	-5	5 Orang		5.47	A (Sangat Baik)
3	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Madya	1615	1	0	0	-1	1 Orang		1.29	A (Sangat Baik)
4	Perencana Ahli Madya	1681	1	0	0	-1	1 Orang		1.34	A (Sangat Baik)
5	Pranata Komputer Ahli Madya	1656	1	0	0	-1	1 Orang		1.32	A (Sangat Baik)
6	Sekretaris Badan	1716	1	1	0	0			1.37	A (Sangat Baik)
7	Pengelola Pengadaan Barang Atau Jasa Ahli Pertama	1528	1	0	0	-1	1 Orang		1.22	A (Sangat Baik)
8	Pengelola Pengadaan Barang Atau Jasa Ahli Muda	1584	1	0	0	-1	1 Orang		1.27	A (Sangat Baik)
9	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1513	1	1	0	0			1.21	A (Sangat Baik)
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2947	2	2	0	0			1.18	A (Sangat Baik)
11	Arsiparis Penyelia	1502	1	1	0	0			1.2	A (Sangat Baik)
12	Arsiparis Ahli Pertama	1504	1	0	0	-1	1 Orang		1.2	A (Sangat Baik)
13	Perencana Ahli Pertama	3060	2	2	0	0			1.22	A (Sangat Baik)
14	Perencana Ahli Muda	1568	1	1	0	0			1.25	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja	Perhitungan		Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
			Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kurang				Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	6806	5	4	0	-1	1 Orang		1.36	A (Sangat Baik)	
16	Pranata Komputer Ahli Muda	1549	1	0	0	-1	1 Orang		1.24	A (Sangat Baik)	
17	Penelaah Teknis Kebijakan	5566	4	3	0	-1	1 Orang		1.48	A (Sangat Baik)	
18	Pengadministrasi Perkantoran	1360	1	0	0	-1	1 Orang		1.09	A (Sangat Baik)	
19	Pengolah Data Dan Informasi	1378	1	0	0	-1	1 Orang		1.1	A (Sangat Baik)	
20	Penata Layanan Operasional	1368	1	0	0	-1	1 Orang		1.09	A (Sangat Baik)	
21	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	1552	1	1	0	0			1.24	A (Sangat Baik)	
22	Penelaah Teknis Kebijakan	1398	1	1	0	0			1.12	A (Sangat Baik)	
23	Pengadministrasi Perkantoran	1364	1	0	0	-1	1 Orang		1.09	A (Sangat Baik)	
24	Penata Layanan Operasional	1368	1	0	0	-1	1 Orang		1.09	A (Sangat Baik)	
25	Operator Layanan Operasional	5555	4	0	2	-2	2 Orang		4.44	A (Sangat Baik)	
26	Pengelola Layanan Operasional	1520	1	1	0	0			1.22	A (Sangat Baik)	
27	Pengelola Umum Operasional	1360	1	0	1	0			1.09	A (Sangat Baik)	
28	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	1656	1	1	0	0			1.32	A (Sangat Baik)	
29	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1536	1	1	0	0			1.23	A (Sangat Baik)	
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1608	1	1	0	0			1.29	A (Sangat Baik)	
31	Penelaah Teknis Kebijakan	2790	2	1	0	-1	1 Orang		2.23	A (Sangat Baik)	

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan		Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/ -	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
			Jumlah Kebutuhan Pegawai	Kurang				Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Pengadministrasi Perkantoran	1388	1	0	0	-1	1 Orang		1.11	A (Sangat Baik)	
33	Penata Layanan Operasional	1440	1	0	0	-1	1 Orang		1.15	A (Sangat Baik)	
34	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan konflik	1658	1	1	0	0			1.33	A (Sangat Baik)	
35	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1533	1	0	0	-1	1 Orang		1.23	A (Sangat Baik)	
36	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1606	1	1	0	0			1.28	A (Sangat Baik)	
37	Penelaah Teknis Kebijakan	2790	2	2	0	0			1.12	A (Sangat Baik)	
38	Pengadministrasi Perkantoran	1363	1	1	0	0			1.09	A (Sangat Baik)	
39	Penata Layanan Operasional	1363	1	0	1	0			1.09	A (Sangat Baik)	
40	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	1653	1	1	0	0			1.32	A (Sangat Baik)	
41	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1544	1	0	0	-1	1 Orang		1.24	A (Sangat Baik)	
42	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1598	1	1	0	0			1.28	A (Sangat Baik)	
43	Penelaah Teknis Kebijakan	2736	2	3	0	1	1 Orang	0.73	C (Cukup)		
44	Pengadministrasi Perkantoran	1355	1	1	0	0			1.08	A (Sangat Baik)	
45	Penata Layanan Operasional	1364	1	0	1	0			1.09	A (Sangat Baik)	
46	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1647	1	1	0	0			1.32	A (Sangat Baik)	
47	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1536	1	1	0	0			1.23	A (Sangat Baik)	

No	Nama Jabatan	Jumlah Perhitungan						Kebutuhan Pegawai		
		Beban Kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/ -	Kurang	Lebih	EJ	PJ
		Jabatan	Pegawai				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Analis Kebijakan Ahli Muda	1599	1	1	0	0			1.28	A (Sangat Baik)
49	Penelaah Teknis Kebijakan	1364	1	0	0	-1	1 Orang		1.09	A (Sangat Baik)
50	Pengadministrasi Perkantoran	1355	1	0	0	-1	1 Orang		1.08	A (Sangat Baik)
51	Penata Layanan Operasional	1368	1	0	1	0			1.09	A (Sangat Baik)
52	Pengawas Penyelenggara Pemilu	1400	1	1	0	0			1.12	A (Sangat Baik)
Jumlah		103970	71	37	6	-28	29 Orang	1 Orang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

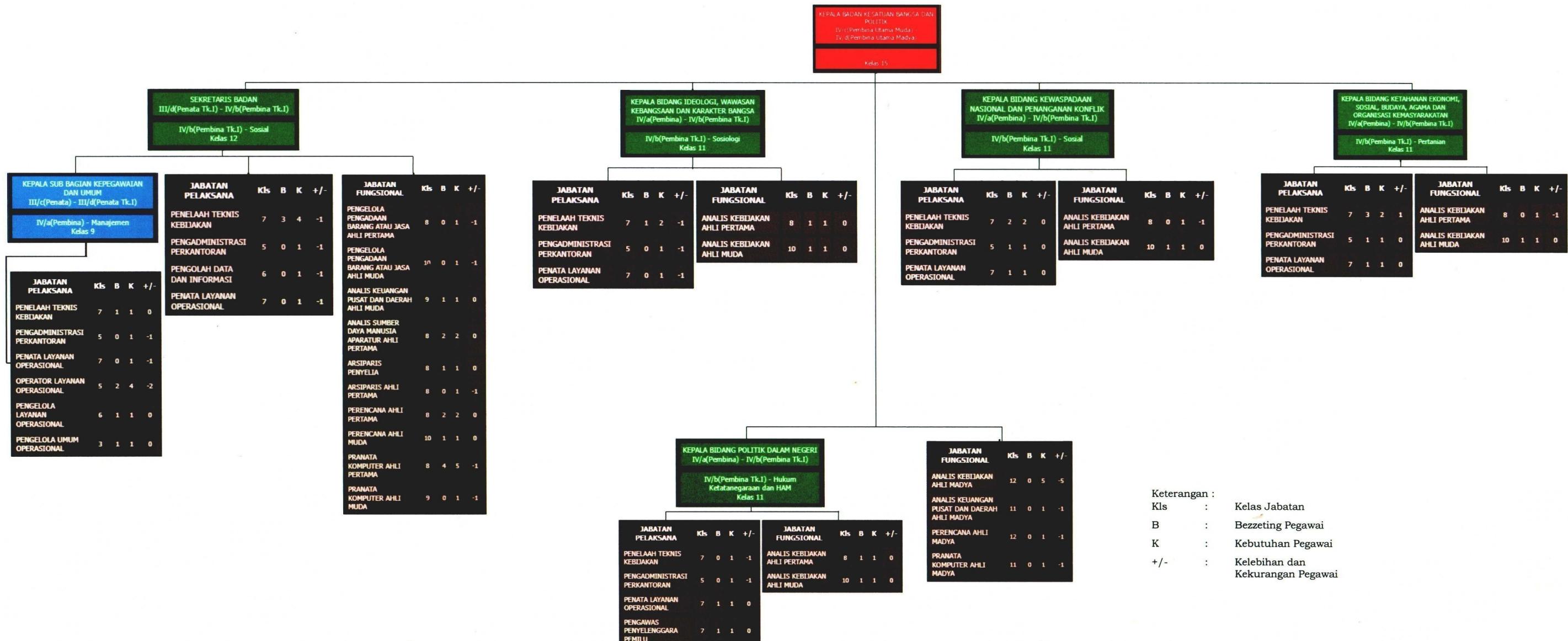


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 473 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 2 DESEMBER 2025
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	<i>[Signature]</i>

Paraf hierarki	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA